

LAYANAN SISTEM INFORMASI PELAPORAN KINERJA BUMDES KECAMATAN TENJOLAYA KABUPATEN BOGOR

Harmi Ibnu Dja'far¹; Hugo Aries Suprpto²; Adhis Darussalam Pamungkas³

Universitas Indraprasta PGRI, Jakarta^{1,2,3}

Email : djafar2662@gmail.com¹; bapak.aries@gmail.com²;

adhis.darussalam.pamungkas@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian evaluasi program ini bertujuan untuk menganalisis kualitas layanan program Bumdes pada sistem informasi pelaporan kinerja bumdes di kecamatan tenjolaya Kabupaten bogor. Penelitian ini menggunakan metode evaluasi program dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi lapangan, dan angket. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa belum tepatnya pelaksanaan terhadap kebijakan layanan Bumdes pada sistem informasi pelaporan kinerja bumdes. Meskipun belum tepat, layanan program bumdes masih dapat terlaksana. Kualifikasi pelaksana bumdes mayoritas lulusan SMA, dengan kemampuan dalam pengelolaan bumdes yang terbatas. Sarana dan prasarana perlu dukungan dari pemerintah desa untuk menjalankan program kegiatan unit-unit usaha, agar dapat memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dari lingkungan, sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan mensejahterakan perekonomian masyarakat desa. Monitoring dan evaluasi Bumdes pada sistem informasi pelaporan kinerja bumdes belum terlaksana secara memuaskan karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan pemerintah tentang bumdes dan mekanisme pelaporan keuangan bumdes.

Kata kunci : Layanan; Sistem Informasi; Pelaporan Kinerja Bumdes; CIPP

ABSTRACT

This program evaluation research aims to analyze the quality of Bumdes program services on performance reporting information system of Bumdes in Tenjolaya District, Bogor Regency. This research uses a program evaluation method with the CIPP model (Context, Input, Process, Product). Data analysis is conducted using qualitative descriptive methods. The instruments used include observation, interviews, field studies, and questionnaires. The research results conclude that the implementation of Bumdes service policies in the performance reporting information system of Bumdes has not been fully appropriate. Despite this, the Bumdes program services can still be carried out. The majority of Bumdes administrators are high school graduates with limited skills in Bumdes management. Facilities and infrastructure need support from the village government to run the business unit activities, in order to utilize existing resources from the environment, thus increasing village income and improving the economic welfare of the village community. The monitoring and evaluation of Bumdes in the performance reporting information system of Bumdes have not been carried out satisfactorily due to a lack of understanding of government regulations on Bumdes and the financial reporting mechanisms of Bumdes.

Keywords : Services; Information System; Bumdes Performance Reporting; CIPP

PENDAHULUAN

Tenjolaya adalah kecamatan yang terletak di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, dengan luas area mencapai 4.126,99 hektar. Kecamatan ini terdiri dari tujuh desa: Desa Tapos 1, Desa Tapos 2, Desa Situdaun, Desa Gunung Malang, Desa Cinangneng, Desa Cibitung Tengah, dan Desa Gunung Mulya. Tenjolaya dibentuk pada tahun 2004 melalui pemekaran dari Kecamatan Ciampea. Kecamatan ini menawarkan berbagai potensi, termasuk dalam bidang pertanian, sumber daya alam, budaya, dan pariwisata.

Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa jika dikelola secara efektif dari awal hingga akhir. Dasar hukum pendirian Bumdes diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 mengenai Bumdes. Pendirian Bumdes dilakukan melalui musyawarah desa yang mempertimbangkan kondisi ekonomi serta sosial budaya masyarakat dan dikelola dengan semangat kekeluargaan serta gotong royong, sebagaimana diatur dalam peraturan desa. Selain berfokus pada keuntungan finansial, Bumdes juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mengembangkan unit usaha untuk memaksimalkan potensi ekonomi desa (PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Bumdes Pasal 3). Sistem Informasi yang baik sangat dibutuhkan untuk mengoptimalkan hasil kegiatan program Bumdes, sehingga dapat diketahui besarnya produksi dan manfaat yang diperoleh dari kinerja Bumdes.

Pelaporan kinerja Bumdes sangat penting untuk memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat guna mendukung kegiatan ekonomi di desa tersebut. Format laporan ini diatur dalam KepMenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa. Laporan keuangan ialah ringkasan dari laporan keuangan sebuah usaha dalam periode tertentu (Riswan & Kesuma, 2014). Organisasi sektor publik mengklasifikasikan pelaporan menjadi dua, yaitu pelaporan keuangan dan pelaporan kinerja. Pelaporan kinerja adalah bentuk pertanggungjawaban yang mencerminkan tanggung jawab dalam hal menyajikan dan melaporkan hasil dari keseluruhan kegiatan, serta pemanfaatan sumber daya yang sesuai dengan rencana. Hal ini merupakan bagian dari proses akuntabilitas (Yuniarti, 2015).

Pelaporan tersebut kemudian dipublikasikan secara transparan sehingga Masyarakat mengetahui hasil kerja bumdes. Pada kenyataan tidak banyak bumdes yang membuat laman informasi tentang hasil kegiatan dari program bumdes tersebut yang bisa diakses untuk mendapatkan informasi untuk sarana publikasi dengan jangkauan yang luas, sehingga masyarakat menghadapi kesukaran dalam mencari data tentang kinerja BUMDes.

Sehingga tidak banyak Masyarakat yang mengetahui perkembangan dan potensi yang ada didesa mampu meningkatkan kemakmuran dan perekonomian masyarakat di pedesaan. Keberadaan BUMDes diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat desa, serta dapat membangkitkan kembali spirit bersosial dan berdemokrasi di tingkat desa. Masyarakat desa juga perlu meningkatkan kemampuan dalam pengelolaan BUMDes. Keterlibatan masyarakat dalam aktivitas BUMDes akan bermuara pada pembangunan BUMDes dan desa itu sendiri secara berkelanjutan. Perlunya diadakan pelatihan-pelatihan secara kontiniu terhadap pelaksana atau pengurus untuk menjamin meningkatnya kapasitas kemampuan dalam pengelolaan unit-unit usaha bumdes.

Program BUMDes di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, telah lama berjalan dan saat ini telah terbentuk sebanyak enam BUMDes dengan berbagai jenis usaha. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan model CIPP (Dja'far, 2024) sebagai model evaluasi yang digunakan dalam mengevaluasi layanan system informasi pelaporan kinerja bumdes di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

Sistem Informasi

Menurut Sutanto dalam (Fattah et al., 2022) mengemukakan bahwa “istem merupakan suatu keseluruhan yang terdiri dari berbagai subsistem atau komponen, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang saling terhubung dan berfungsi secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut (Pratama, 2018) menyatakan bahwa “Sistem merupakan sekumpulan subsistem, bagian, atau komponen, baik yang bersifat fisik maupun nonfisik, yang saling terhubung dan bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan tertentu.”. Selain itu (Mulyani, 2016) memaparkan “Sistem adalah rangkaian prosedur yang saling terkait dan berkolaborasi untuk melaksanakan aktivitas atau mencapai sasaran yang telah direncanakan”.

Berdasarkan pendapat dari diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem adalah komponen-komponen dari subsistem yang terintegrasi. Prosesnya saling berkaitan satu sama lain agar tercapainya target output yang diinginkan.

Informasi bisa dianggap sebagai data yang telah diproses dan diubah menjadi format yang bermanfaat dan relevan bagi penerimanya. Selain itu, informasi merupakan hasil dari pengolahan data yang terstruktur dan memberikan manfaat bagi individu yang mendapatkannya. (Askar & Mashud, 2024).

Pelaporan Kinerja Bumdes

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus didirikan oleh pemerintah desa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes. Pengurus BUMDes perlu memiliki jiwa kewirausahaan yang kreatif dan inovatif serta kemampuan profesional dalam pengelolaannya. Hal ini penting untuk mengidentifikasi peluang usaha dengan tepat. Selain mempertimbangkan potensi desa dan kebutuhan lokal, unit usaha BUMDes harus dirancang agar tidak bersaing dengan usaha milik warga desa (Setyobakti, 2017). Kualitas dan kompetensi pengurus BUMDes sangat krusial karena mempengaruhi kinerja dan manfaat yang diperoleh untuk kepentingan desa, seperti peningkatan pendapatan asli desa. Kinerja, merujuk pada hasil yang dicapai dalam hal kualitas dan kuantitas oleh individu atau organisasi saat melaksanakan tugas-tugas yang telah didelegasikan (Susanto, 2015). Laporan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keberlanjutan usaha dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan BUMDes (Nurhidayati et al., 2023).

Laporan kinerja BUMDes berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas dan penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan program-program BUMDes. Kinerja BUMDes yang efektif dapat dinilai dari beberapa aspek, seperti kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat, keuntungan usaha, dan keberlanjutannya. Pelayanan yang berkualitas akan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam BUMDes (Qosjim, 2017). Sistem pelaporan kinerja merupakan gabungan dari beberapa komponen saling berhubungan dan terintegrasi, serta bekerja bersama supaya target dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat tercapai (Pamungkas & Alifah, 2021). Dalam proses ini, penting untuk mengikuti prinsip-prinsip umum pelaporan,

yang mencakup keterbukaan, kejujuran, ketepatan, dan objektivitas dalam penyusunan laporan (Madjodjo & Dahlan, 2020).

Evaluasi merupakan proses di mana data yang dikumpulkan dianalisis dan disintesis untuk menghasilkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Proses ini melibatkan penjabaran, pengumpulan, penyampaian, dan penerapan informasi deskriptif serta evaluatif mengenai manfaat dan nilai dari berbagai aspek seperti tujuan, desain, pelaksanaan, dan hasil. Tujuan evaluasi adalah untuk memandu perbaikan, menyusun laporan akuntabilitas, mendukung keputusan tentang penyebaran informasi, serta memperdalam pemahaman mengenai fenomena yang dianalisis (Dja'far, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode adalah suatu cara kerja yang dapat digunakan untuk memperoleh sesuatu. Sedangkan metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara kerja di dalam proses penelitian, baik dalam pencarian data ataupun pengungkapan fenomena yang ada (Zulkarnaen, W., et al., 2020:229). Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor yang berjumlah 6 (enam) bumdes yaitu 1. Bumdes Sumber Harapan, Desa Cibitung Tengah. 2. Bumdes Salak Jaya Mandiri Makmur, Desa Tapos 1. 3. Bumdes Bina Lestari, Desa Tapos 2. 4. Bumdes Karunia Cemerlang, Desa Cinangneng. 5. Bumdes Citra, Desa Gunungmalang. 6. Sumber Daya Barokah, Desa Situ Daun, di kecamatan tenjolaya kabupaten bogor. Objek penelitian adalah bumdes, pelaksana bumdes, Masyarakat, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa dan dinas pemberdayaan Masyarakat dan desa kabupaten bogor. Model Evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang digunakan sebagai salah satu sebuah metode penelitian kualitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, angket/kuesioner dan dokumentasi (Sugiyono, 2009). Alat observasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan. Wawancara dilakukan dengan pelaksana BUMDes, pejabat pemerintah desa, pemerintah kecamatan, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kuesioner dibagikan kepada masyarakat untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Pengumpulan data dokumentasi, seperti foto, digunakan sebagai tambahan untuk memperkuat hasil penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan model evaluasi CIPP.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Analisis implementasi menggunakan model evaluasi CIPP mencakup empat komponen utama: context, input, process, dan product. Context Evaluation berfokus pada peraturan dan pedoman yang mengatur BUMDes. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, acuan ini harus diikuti oleh semua BUMDes untuk memastikan operasional unit-unit usaha yang optimal. Selain itu, KepMenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes juga menjadi pedoman dalam pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan BUMDes kepada masyarakat melalui musyawarah desa.

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes memiliki simpulan yaitu bahwa peraturan ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa melalui pengelolaan usaha yang efektif, penyediaan layanan umum, peningkatan pendapatan asli desa, serta pemanfaatan aset desa. Selain itu, peraturan ini juga berfokus pada pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara keseluruhan. Peraturan ini juga menetapkan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pengelolaan BUMDes, yaitu: a. Profesionalisme b. Keterbukaan dan akuntabilitas c. Partisipasi d. Prioritas pada sumber daya lokal e. Keberlanjutan.

Layanan sistem informasi pelaporan kinerja BUMDes adalah kunci untuk mencapai dan merealisasikan visi, misi, serta tujuan dari organisasi. (Widiastuti et al., 2019). Selain itu, kinerja merupakan hasil dari perencanaan strategis organisasi yang bertujuan untuk mewujudkan visinya. Keberhasilan tersebut sangat bergantung pada pelaksanaan program-program yang dirancang dengan matang (Baderan & Napu, 2020) Hasil analisis data observasi dan wawancara untuk evaluasi konteks, input, proses, dan produk dari implementasi PP No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes dan KepMenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes adalah sebagai berikut:

Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*) Evaluasi ini bertujuan untuk merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan. Evaluasi konteks mencakup analisis kebutuhan, landasan kebijakan, serta tujuan dan sasaran. Pertanyaan utama dalam evaluasi ini adalah "Apa yang dibutuhkan?" Dalam

konteks program BUMDes dan sistem informasi pelaporan kinerja di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, pertanyaan ini ditujukan untuk memahami kebutuhan spesifik sesuai dengan PP No. 11 Tahun 2021 dan KepMenDesa PD TT RI Nomor 136 Tahun 2022. Tujuan utama evaluasi konteks adalah untuk memastikan apakah kebijakan tersebut memiliki landasan formal yang kuat dan untuk menilai kelebihan serta kelemahan pelaksanaan kebijakan di BUMDes Kecamatan Tenjolaya.

Evaluasi Input (*Input Evaluation*) bertujuan untuk menentukan perubahan yang diperlukan dalam program dengan mengidentifikasi hambatan dan potensi sumber daya yang ada. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (15-29 Agustus 2024) dengan enam pelaksana BUMDes, ditemukan beberapa hal penting. Dari aspek strategi dan perencanaan program, terlihat bahwa strategi yang ada masih kurang jelas dalam rencana kerja tahunan dan belum sepenuhnya diterapkan. Wawancara mengungkapkan bahwa strategi untuk mendukung pencapaian program BUMDes melibatkan sosialisasi yang berbasis pada potensi dan kebutuhan desa. Namun, dukungan dan tata ruang wilayah belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha dan kerjasama antar desa. Di sisi lain, dalam aspek struktur dan sumber daya manusia, ditemukan bahwa beberapa unit usaha terbentuk karena adanya peluang pasar yang diperlukan masyarakat, namun belum memanfaatkan potensi desa seperti hasil pertanian. Wawancara juga menunjukkan bahwa kompetensi pengurus BUMDes masih belum memadai untuk melaksanakan program kerja secara efektif, sehingga beberapa unit usaha mengalami kerugian dan tidak berjalan sesuai rencana.

Hasil observasi pada aspek anggaran serta sarana dan prasarana menunjukkan bahwa dana penyertaan modal desa untuk pelaksanaan program BUMDes masih tergolong terbatas. Agar dapat memperoleh tambahan modal, BUMDes perlu menyusun analisis usaha yang jelas untuk menunjukkan potensi pendapatan asli desa dari program tersebut. Selain itu, wawancara dengan pelaksana BUMDes mengindikasikan bahwa mereka belum memiliki keterampilan literasi keuangan yang cukup, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan program. (Rahmadi et al., 2021) Perencanaan keuangan bermanfaat untuk membuat proposal dan analisis usaha pada rencana bisnis. Sehingga pemerintah desa tidak dapat memberikan bantuan dana sebagai penyertaan modal dari desa.

Evaluasi Proses (*Process Evaluation*) adalah pelaksanaan program. Pertanyaan mendasar yakni: “apakah program sedang dilaksanakan?”. Evaluasi proses memungkinkan peninjauan kembali rencana organisasi serta identifikasi elemen-elemen kunci yang perlu dipantau dan dievaluasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa tujuan utama dari evaluasi proses adalah untuk memastikan bahwa proses tersebut berjalan dengan baik. Hasil temuan penelitian pada aspek aplikasi dan implementasi program bahwa dalam proses pelaksanaan program kegiatan pada system informasi pelaporan kinerja bumdes peneliti memperoleh data dan informasi bahwa sudah ada penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana kerja. Rencana kerja dilaksanakan sesuai dengan tahapan proses yang dilakukan oleh bumdes dan berdasarkan rencana strategis yang dilakukan secara tahunan melalui musyawarah desa. Operasional unit-unit usaha bumdes juga dilakukan secara efisien dengan mempertimbangkan anggaran dana yang ada dapat berjalan (Azizah & Syafitri, 2017). Bantuan program dari pemerintah pusat melalui kementerian sangat mendukung keberhasilan unit-unit usaha BUMDes. Koordinasi internal dalam BUMDes mengikuti tahapan proses kinerja yang telah dirancang dalam rencana strategis tahunan. Proses ini mencakup arahan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program oleh pengurus BUMDes dan unit-unit usahanya. Koordinasi internal dilaksanakan melalui pertemuan dan rapat rutin untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program (Edo Pradipta Mahadika et al., 2021).

Dalam koordinasi antara bumdes dan pemerintah desa dilakukan untuk menyampaikan kebutuhan-kebutuhan untuk pelaksanaan program bumdes. Koordinasi secara internal juga memiliki peran untuk pengawasan untuk pencapaian-pencapaian target yang telah ditetapkan dalam perencanaan program. Sistem pengawasan juga jelas tersusun dalam struktur organisasi pelaksana bumdes. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes, Pasal 31 Ayat 2 Poin a menetapkan bahwa pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan operasional BUMDes harus dilakukan secara bersama oleh pelaksana operasional. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja, yang harus sesuai dengan Anggaran Dasar. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aktivitas BUMDes berjalan sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peneliti menemukan indikasi yang menunjukkan adanya keterbatasan dalam pencatatan kegiatan-kegiatan pada program bumdes dalam sistem informasi pelaporan kinerja pada bumdes sehingga bumdes melakukan pencatatan secara manual dalam buku catatan, kemudian catatan tersebut dipindahkan ke komputer melalui bantuan tenaga dari pemerintah bumdes (Mujazie, 2022) . Pelaporan yang dilakukan oleh pelaksana BUMDes kepada pemerintah desa masih terbatas pada laporan keuangan sederhana, disertai bukti pengeluaran dana. Selain itu, laporan yang berbentuk narasi tentang pelaksanaan kegiatan di unit-unit usaha BUMDes tidak tersedia. Meskipun begitu, kinerja BUMDes dalam sistem informasi pelaporan di Kecamatan Tenjolaya belum sepenuhnya efektif jika diukur berdasarkan pencapaian sasaran dalam rencana kerja tahunan. Pelaksana BUMDes telah berusaha keras untuk merealisasikan rencana dan mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan asli desa (Anggraeni, 2016). Tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat menghasilkan secara maksimal dikarenakan beberapa kendala yang dihadapi dalam menjalankan program bumdes tersebut, sehingga menjadi terhambat dalam pencapaian tujuan program.

Evaluasi Produk (*Product Evaluation*) bertujuan untuk mengukur, menafsirkan, dan menilai hasil akhir dari sebuah program. Komponen produk merupakan indikator akhir dari keberhasilan atau kegagalan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi produk melibatkan penilaian terhadap semua aspek terkait pelaksanaan program BUMDes dalam sistem informasi pelaporan kinerja. Setiap komponen dan aspek yang relevan dengan implementasi program akan dievaluasi berdasarkan hasil akhir atau produk yang dihasilkan (Hardhienata, 2017). Pelaksanaan program BUMDes menunjukkan efektivitas yang kurang optimal. Kendala utama yang dihadapi oleh pelaksana BUMDes termasuk kekurangan sumber daya manusia, serta implementasi kegiatan dan pembuatan laporan yang masih dilakukan secara manual dan tidak tersistem. Akibatnya, kegiatan program berjalan kurang efektif dan tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes serta KepMenDesa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan BUMDes sebagai pedoman di Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor.

KESIMPULAN

Hasil evaluasi model CIPP terhadap implementasi PP no. 11 tahun 2021 tentang bumdes dan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2022 Tentang Panduan Penyusunan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa diperoleh gambaran bahwa peraturan tersebut telah terlaksana namun belum sesuai, utamanya pada sistem informasi pelaporan kinerja bumdes. Bumdes berupaya memperbaiki kelemahan dengan perbaikan melalui pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pelatihan dan pendampingan tersebut akan dimasukkan ke dalam musrenbang pemerintah desa dan pemerintah kecamatan untuk dijadikan agenda tetap sebagai pengembangan kapasitas pengelola dan pelaksana unit-unit usaha bumdes.

Saat kegiatan *focus group discussion* yang dihadiri oleh Camat dan kepala seksi ekonomi dan Pembangunan kecamatan tenjolaya, Pegiat desa, tenaga ahli dari Kemendes, Ahli dan Praktisi IT, pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, pelaksana bumdes, tenaga pendamping desa dan Masyarakat menghasilkan rencana tindak lanjut yaitu : 1. Hidupkan BUMDES Tenjolaya berdasarkan potensi SDA (tanah subur, ekowisata, dsb), 2. Manfaatkan budaya lokal seperti kerajinan tangan, kuliner, kearifan lokal. 3. Berpikir *out of the box* rangkul pemdes, akademisi, dan perusahaan swasta. 4. Dalam pembangunan BUMDES libatkan pemuda desa, berdayakan perempuan, tokoh masyarakat desa melalui musyawarah desa akan muncul ide ide orisinil yang kreatif, 5. Kebutuhan tiap BUMDES berbeda-beda. Pahami kebutuhan infrastruktur, pendidikan kesehatan, dan ekonomi. Prioritaskan kebutuhan, 6. Buat Website sesuai kebutuhan masing-masing bumdes karena tiap bumdes berbeda karakteristiknya. Paling utama pahami dulu tupoksi pelaporan seperti LPJ yang selama ini tidak berjalan dengan baik.

Sedangkan saran untuk penelitian selanjutnya dikembangkan pada model pengembangan manajerial pelaksana bumdes, untuk pengelolaan bisnis menuju industri skala kecil dan menengah. Industri kecil sering kali menganggap bahwa mereka akan tertarik untuk berkolaborasi, yang berarti saling membantu dalam mengatasi tantangan yang dihadapi. Kolaborasi ini mencakup upaya bersama dalam memperoleh bahan baku dan bahan mentah, serta dalam memasarkan produk yang dihasilkan. (Isyanto, 2017).

PENGHARGAAN/UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan pendanaan hibah penelitian tahun anggaran 2024 atas terlaksananya penelitian ini.

REFERENSI

- Anggraeni, M. R. (2016). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Pada Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan. *Modus Journal*, 28(2), 155–167.
- Askar, & Mashud. (2024). Sistem Informasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Mandiri Desa Minasa Baji Kecamatan Bantimurung Kabupaten Maros. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 3(1), 1–10.
- Azizah, R., & Syafitri, W. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Peningkatan Akses Usaha Masyarakat Di Desa Putukrejo Kecamatan Gondanglegi Dan Desa Gondowangi Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. *Jimfeb Universitas Brawijaya*, 5(2).
- Baderan, U. S., & Napu, B. (2020). Peran Bumdes Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Ayuhula Kecamatan Dungaliyo Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and accounting Public*, 3(2), 66–72.
- Dja'far, I. H. (2024). Evaluasi Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Bogor dalam Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat. *Journal of Language and Literature Education*, 1(2). <https://journal.ppmi.web.id/index.php/jolale/article/view/866/629>
- Edo Pradipta Mahadika, Kusworo, & Ondo Riyani. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DESA DI KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia*, 13(2), 375–390. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.440>
- Fattah, A., Massikki, & Parenreng, J. M. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Milik Desa (BUMDes) Di Desa Baru, Polewali Mandar. *INTEC Journal: Information Technology Education Journal*, 1(3), 17–22.
- Hardhienata, S. (2017). *Sistem Informasi Manajemen*. Program Pascasarjana Universitas Pakuan.
- Isyanto, P. T. (2017). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bum Desa) Di Desa Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Universitas Negeri Semarang.
- Madjodjo, F., & Dahlan, F. (2020). Analisis kinerja Badan Usaha Milik Desa dalam pengelolaan anggaran untuk meningkatkan pengolahan potensi desa di Desa Akedotilou. *AIJ: Indonesia Accounting Journal*, 2(2). <https://doi.org/10.32400/iaj.31055>
- Mujazie, S. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Studi Fenomena Pada Bumdes Tanjung Raya Desa Boyan Tanjung, Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat). *Prosiding Seminar Bisnis*. <https://doi.org/10.31092/kuat.v5i1.2167>
- Mulyani, S. (2016). *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*. Abdi Sistematika.

- Nurhidayati, N., Purwanti, D., & Aji, L. P. (2023). Pelaporan Keuangan BUM Desa, Wujud Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan (Pendampingan pada BUM Desa Berkah Sae Kedak Kediri). *Kuat: Keuangan Umum dan Akuntansi Terapan*, 5(1), 59–65.
- Pamungkas, A. D., & Alifah, S. (2021). Pengenalan Literasi Keuangan di SMA/K Driewanti Bekasi. *SNPPM-3 (Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat)*, 3, 313–318.
- Pratama, R. S. (2018). *SISTEM INFORMASI BADAN USAHA MILIK DESA BERBASIS WEB (Studi Kasus : BUMDes Sedupi Indah Pada Desa Sedupi Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir)*. UIN Raden Fatah.
- Qosjim, A. (2017). Analisis Kinerja BUMDes di Kabupaten Lumajang. *Jurnal Ekuilibrium*, 1(1).
- Rahmadi, A., Sutrio, S., Nugroho, A., Bertalina, B., Sumardilah, D. S., Muliani, U., Lupiana, M., Mulyani, R., Wahyuni, E. S., Putri, S., J, Y. N., & Sejati, N. I. P. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedaung Kota Bandar Lampung Menuju Desa Tangguh Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(2), 55–63. <https://doi.org/10.52436/1.jpmi.11>
- Riswan, & Kesuma, Y. F. (2014). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Bandar Lampung*, 5(1). <https://www.neliti.com/id/publications/95812/analisis-laporan-keuangan-sebagai-dasar-dalam-penilaian-kinerja-keuangan-pt-budi#cite>
- Setyobakti, M. H. (2017). IDENTIFICATION OF BUSINESS ENTERPRISES BUMDES BASED ON SOCIAL AND ECONOMIC ASPECT. *Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen (JEMA)*, 14(2), 101–110.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, B. (2015). *Manajemen Strategik Komprehensif untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Erlangga.
- Widiastuti, H., Putra, W. M., Utami, E. R., & Suryanto, R. (2019). Menakar tata kelola badan usaha milik desa di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 22(2), 257–288. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2410>
- Yuniarti, R. (2015). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 3(1). <https://doi.org/10.37676/ekombis.v3i1.93>
- Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. (2020). Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 4(2), 222-243. <https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp222-243>.